

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aries, A. (2026). *Surat Dakwaan Sebagai Dasar Putusan Hakim*.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4315/surat-dakwaan-sebagai-dasar-putusan%0Ahakim%0A>
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Danil, E., & Nelwitis. (2002). *Diktat Hukum Penitensir*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Djamali, A. (2012). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Efendi, T. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- Farid, A. Z. A., & Hamzah, A. (2006). *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensir*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Fuady, M. (2005). *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, A. (2008). *Azaz-Azaz Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Y. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harapan, M. Y. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- KEMENDIKBUD. (2026). *Temukan Bantuan Menggunakan KBBI Daring*.
- Lubis, Z., & Rionga, B. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana.
- Mardani., H. (2008). *Penyalah Gunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenade Media.
- Masriani, Y. T. (2015). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

Moeljatno. (2009). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

Mulyadi, & Arief, B. N. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Mulyadi, L. (1996). *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Puusan Pengadilan)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Mulyadi, L. (2007). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Mulyadi, L. (2010). *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Prinst, D. (1998). *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan. SEJA Nomor: SE-004/J.A/I/1993.

Simanungkalit, P. (2011). *Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Wajar Hidup.

Soetomo, A. (1990). *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen Cetakan ke II*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sugiart, U. S. (2015). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sunarso, S. (2012). *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta.

Jurnal/Artikel/Thesis/Disertasi

Abidin, M. N. (2025). *Diskresi Status Anak Dalam Surat Edaran, Undang-Undang Perkawinan, Dan Putusan Mahkamah Konstitusi* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)).

Anwar, R. (2025). *Efektifitas Restorative Justice Dalam Penanggulangan Overcrowding Pada Lembaga Pemasyarakatan Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Aryanti, M., Habiburrahman, H., & Albuhari, A. (2025). *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Perspektif Maqashid Syariah* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).

- Astry, N. L. (2023). Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 49/Pid. Sus/2022/Pn Kot) (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung).
- Badoyo, S. Rekonstruksi Hukum Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika. Universitas Jambi.
- Desy Vijayanti, D. V. (2025). Kolaborasi Pentahelix Dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Di Upt. Pprsa Inang Matutu Provinsi Sulawesi Selatan (Doctoral Dissertation, Politeknik Stia Lan Makassar).
- Herlina, M. (2024). Analisis Dampak Implementasi Norma Penjelasan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Kepastian Dan Efektivitas Penegakan Hukum Di Indonesia. *Journal Of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 1(1), 46-58.
- Juliansyah, E. R. (2022). Efektivitas Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi Di Lapas Narkotika Kelas Ii A Langkat) (Doctoral Dissertation, Pascasarjana).
- Yunita, D. (2025). *Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kulon Progo)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

UU/SE/PUTUSAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993

Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs.

Internet

- Pengguna Narkoba di Indonesia Capai 3,4 Juta Orang.* (2026). <https://fin.co.id/2021/06/28/pengguna-narkoba-di-indonesia-capai-34-juta-orang/>

Prevalensi Narkoba 2023–2025 Naik Menjadi 2,11 Persen: BNN RI Perkuat Kebijakan Berbasis Data,” Tobasatu.Com, 2025, https://www.tobasatu.com/2025/12/23/prevalensi-narkoba-2023-2025-naik-menjadi-211-persen-bnn-ri-perkuat-kebijakan-berbasis-data/?utm_source

Merdeka.com. 2025. “Fakta unik: 3,3 juta jiwa terlibat narkoba, Prabowo dorong regulasi pemberantasan narkoba lebih kuat.” Merdeka.com, 30 Oktober 2025. <https://www.merdeka.com/peristiwa/fakta-unik-33-juta-jiwa-terlibat-narkoba-prabowo-dorong-regulasi-pemberantasan-narkoba-lebih-kuat-488188-mvk.html>.

